

Perlindungan Hukum Secara Perdata dan Pidana terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 1495K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379K/Pid/2021) = Civil and Criminal Legal Protection for Notaries in the Drafting of Sale and Purchase Agreement Deeds (A Study of Decision Number 1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021)

Rizky Pradipta, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920567380&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata dan pidana terhadap notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris dikaitkan dengan pernyataan utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1495K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379K/Pid/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengkaji doktrin-doktrin hukum terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Akta PPJB yang dibuat oleh notaris dikesampingkan oleh perjanjian lisan dan notaris dalam kasus yang diteliti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan Akta PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris, mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila dibandingkan dengan perjanjian utang piutang secara lisan yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti lain yang dapat menunjang kesaksian para pihak, sebagaimana pengakuannya bahwa telah melakukan perjanjian utang piutang secara lisan. Kedudukan Akta PPJB seharusnya tidak dapat dikesampingkan keabsahannya oleh perjanjian lisan dan notaris memerlukan perlindungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugasnya untuk menghindari tuntutan hukum yang merugikan. Perlindungan hukum secara perdata dan pidana bagi notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan Putusan Nomor 1495k/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379k/Pid/2021 tidak terpenuhi. Hal ini karena, Akta PPJB dalam kasus a quo merupakan akta partij, yakni akta perjanjian yang merupakan suatu tindakan hukum yang mengindahkan undang-undang melakukan kesepakatan dan memenuhi isi dari kesepakatan.

.....This research aims to analyze civil and criminal legal protection for notaries in the drafting of Sale and Purchase Agreement Deeds (SPAD) and the legal standing of SPADs drawn up before a notary, in connection with oral debt acknowledgment agreements based on Decision Number 1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021. The study employs a doctrinal research method, which examines relevant legal doctrines. The secondary data utilized include primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and document analysis. The results of the study reveal that the legal standing of SPADs drafted by notaries is overridden by oral agreements. In the cases studied, notaries did not receive adequate legal protection. The SPAD, created in the presence of a public official (in this case, a notary), inherently possesses superior legal certainty compared to oral debt acknowledgment agreements, which lack legal certainty due to the absence of supporting evidence corroborating the parties' testimony regarding the oral agreement. The legal standing of SPADs should not be set aside in favor of oral agreements, and notaries require stronger legal protections in the execution of their duties to prevent detrimental legal claims.

Civil and criminal legal protection for notaries in the drafting of SPADs, as examined through Decision Number 1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021, is found to be inadequate. This is because the PPJB Deed in the case a quo constitutes a partij deed, namely a contractual deed that serves as a legal act adhering to statutory regulations, entered into by mutual agreement, and fulfilling the terms of the agreement.